



KOTA YOGYA TAK TUTUP DESTINASI WISATA

Pengawasan Pengunjung Semakin Diperketat

YOGYA (KR) - Kebijakan pengetatan PPKM mikro seiring instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terbaru dinilai akan semakin menguatkan langkah bersama antara pusat hingga daerah. Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya pun akan memperketat pengawasan pengunjung karena destinasi wisata di Kota Yogya tidak akan ditutup.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku sebagian besar instruksi Mendagri tersebut sudah dilakukannya dalam merespons perkembangan kasus di Kota Yogya. "Hal-hal yang berubah di antaranya jam tutup resto, kafe dan layanan umum yang semula pukul 21.00 menjadi 20.00 WIB. Begitu juga kapasitas resto dan pertemuan semula 50 persen menjadi 25 persen," jelasnya, Selasa (22/6).

Diakunya, destinasi wisata di kabupaten lain yang ditutup saat akhir pekan bisa berimbas lonjakan pengunjung ke Kota Yogya. Hal itu pun sudah diantisipasi dengan memperketat pengawasan bagi pengunjung. Pengawasan tersebut guna memastikan protokol kesehatan mampu dijalankan dengan baik. Termasuk identitas kesehatan wisatawan yang ber-

asal dari zona merah, yakni harus menyertakan surat keterangan bebas Covid-19 hasil rapid tes antigen atau swab PCR.

Heroe menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar terlibat secara aktif dalam hal pengawasan. Terutama melibatkan Sat Pol PP Kota Yogya, Sat Pol PP DIY, Kodim dan kepolisian. Operasi gabungan pun sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu dengan sejumlah lokasi sasaran. "Termasuk pencegahan secara acak kendaraan di jalan, patroli di tempat parkir, destinasi wisata dan tempat umum lainnya. Bahkan sudah ada beberapa armada bus yang terpaksa diputar balik karena tidak memiliki identitas kesehatan," urainya.

Diakunya, akhir-akhir ini terjadi lonjakan kasus yang cukup massif di Kota Yogya maupun kabupaten lain di

DIY. Cepatnya penularan yang ditemukan tersebut belum dapat dipastikan apakah karena varian baru virus Korona atau bukan namun pertumbuhan kasus termasuk cukup cepat.

Khusus untuk ASN di lingkungan Pemkot Yogya saat ini tercatat ada 52 kasus. Sebagian besar ditemukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) hingga 30 kasus. Sisanya tersebar di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Pihaknya pun masih menunggu hasil tracing dan testing dari orang yang kontak erat.

Kendati demikian, layanan OPD di Pemkot Yogya tetap berjalan seperti biasa, hanya kantor Dinsosnakertrans yang sementara waktu menutup aktivitas kantor. "Sebagian besar OPD tetap menjalankan fungsi sebagaimana tugasnya. Apalagi dengan Jogja Smart Service (JSS) sudah banyak layanan ke masyarakat bisa dilakukan dengan online. Artinya, selama masa pandemi atau peningkatan kasus di Balaikota, sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi JSS, maka akan memperoleh layanan yang sama," urainya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005